

## PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMOHONAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SELF ASSESMENT

	NOMOR SOP	067/710/25.01/2020	
RUDUS C	TANGGAL PEMBUATAN	4 Maret 2020	
	TANGGAL REVISI		
	TANGGAL EFEKTIF		
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	DISAHKAN OLEH	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	NAMA SOP	PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SELF ASSESSMENT	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKS	ANA	
<ol> <li>UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.</li> <li>Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> <li>Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kudus.</li> </ol>	Memiliki kemamp     Mengetahui Siste	uan dasar mengolah data sederhana uan menggunakan komputer m Aplikasi SIMPADA dan SIMBPHTB	

Hak Atas Tanah dan Bangunan. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet.
- 11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kudus.

## PERALATAN / PERLENGKAPAN

- 1. Komputer
- 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
- 4. Jaringan Internet
- 5. Aplikasi SIMPADA dan SIMBPHTB

## PERINGATAN

KETERKAITAN

1. SOP Permohonan Nomor Wajib Pajak Daerah

Apabila pembayaran pajak daerah tidak terealisasi maka akan mempengaruhi pendapatan pemerintah terutama disektor pajak daerah

PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan sebagai data elektronik dan manual

		Pelaksana			Mutu baku				
No.	Kegiatan	Kepala BPPKAD	Kepala Bidang Pendapaan	Kasubbid perencanaan dan Penatapan	Staf BPPKAD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	output	Ket
1.	Mengecek system eSPTPD untuk mengetahui apakah ada data SPTPD yang masuk.			Tenangan	mulai	SPTPD     Dokumen     pendukung	5 menit		
2.	Apabila ada SPTPD yang masuk dalam sistem eSPTPD, melaporkan ke Kepala Subbidang			-		SPTPD     Dokumen     Pendukung	5 menit		
3.	perencanaan dan penetapan.  Menerima laporan data SPTPD dan melaporkannya ke kepala bidang pendapatan untuk dilakukan verifikasi.					Data SPTPD	5 menit	SKPD	
-4.	Menerima laporan data SPTPD, kemudian melaporkannya ke kepala badan untuk dilakukan verifikasi					Data     SPTPD	5 menit	SKPD	
5.	Memverifikasi data SPTPD dengan cara melakukan approve SPTPD yang ada didalam sisem eSPTPD sehingga terbit Id Billing sebagai media pembayaran wajib pajak ke Bank Persepsi					• Data SPTPD	5 menit	Approve SPTPD	
*		selesai			H				

REPART PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABURATEN KUDUS

B P P K

EKA DIUMARTONO, SE

Pembina Utama Muda

TUPDI 6581004 199303 1 006